

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kepala Desa adalah figur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, yang berdasarkan kebijakan yang disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai kepala pemerintahan, Kepala Desa bertanggung jawab atas berjalannya roda pemerintahan desa, karena dia adalah perwakilan yang terpilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa diharapkan memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, serta sifat kepemimpinan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, dia juga bertanggung jawab atas koordinasi, fungsi, dan peran dalam pemerintahan desa. (Mahayana, 2013)

Selain itu, Kepala Desa juga berperan penting dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pemerintahan desa. Ia harus menjadi jembatan antara pemerintah desa dan warga, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam setiap kebijakan dan inisiatif. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Kepala Desa juga harus menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa berpegang pada prinsip demokrasi, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penting baginya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tata pemerintahan yang baik untuk menumbuhkan pemerintahan yang transparan dan beretika. Selain itu, Kepala Desa mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya desa secara efektif, meliputi urusan keuangan, pemanfaatan lahan, dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam lingkup yang lebih luas, tugas Kepala Desa mencakup kerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota, serta instansi dan lembaga terkait lainnya, untuk mendukung upaya pembangunan desa. Selain itu, ia harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan dinamika lingkungan dan sosial yang berkembang dalam masyarakat desa, sehingga memungkinkannya mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi permasalahan yang muncul secara efisien.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia, mirip dengan pemilihan umum. Ini adalah contoh konkret dari praktek demokrasi yang dilakukan di tingkat paling sederhana dalam kehidupan masyarakat. Pilkades melibatkan calon-calon yang telah melalui proses seleksi yang ketat, memastikan bahwa mereka kompeten untuk memimpin. Transparansi adalah kunci dalam proses ini, di mana masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga perhitungan suara. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat, tanpa perantara, memastikan keikutsertaan aktif dari mereka dalam proses politik. Partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam pemilihan ini, karena mereka memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam penentuan arah kebijakan pemerintah desa. (Averus & Alfina, 2020)

Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat desa, partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) kedalam simbol-simbol pribadi. Dengan kata lain partisipasi politik adalah proses memformulasikan ulang simbol-simbol komunikasi berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok (Jisokhi 2020)

Tujuan dari Pilkades tidak hanya terbatas pada pemilihan pemimpin, tetapi juga mencakup pencarian sosok yang memiliki kualitas dan integritas untuk memimpin serta mengelola desa. Pemilihan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, menciptakan pemerintahan desa yang efektif, dan mengokohkan prinsip demokrasi sebagai landasan utama dalam pemerintahan Indonesia. Pilkades, dengan demikian, bukan hanya sebuah proses pemilihan kepala desa, melainkan juga representasi dari semangat demokrasi yang hidup dan berkembang di komunitas desa di seluruh Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Kepala Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Jember, dalam memenangkan pemilihan. Penelitian ini akan mengadopsi beberapa pendekatan, antara lain teori komunikasi politik, teori kepemimpinan, dan teori opini leader.

Teori yang pertama adalah teori leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh Kenneth Blanchard dan Paul Hersey. Model kepemimpinan buatan Blanchard-Hersey ini mengacu pada keterampilan seseorang untuk menilai kemudian memilih strategi kepemimpinan apa yang menurutnya terbaik diterapkan dalam setiap keadaan atau tugas berbeda.

Pendekatan situasional diartikan sebagai pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilaku, sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan gaya atau tipe kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki kemampuan untuk mendiagnosa dalam perilaku manusia. (Khoironi 2020)

Teori Situasional menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi tertentu. Hal ini menyoroti kemampuan beradaptasi para pemimpin untuk menyesuaikan gaya mereka sesuai dengan keadaan. Menolak gagasan pendekatan kepemimpinan yang bersifat universal, teori ini menggarisbawahi kebutuhan pemimpin untuk menilai situasi dan menyesuaikan gaya mereka berdasarkan kebutuhan unik anggota tim mereka. (Zidan Rikza 2023)

Dalam Model Kepemimpinan Situasional Tiga Dimensi, terdapat tiga pola dasar perilaku kepemimpinan. Pertama adalah orientasi pada tugas (task-oriented), yang mengacu pada keinginan kuat seorang pemimpin untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif. Kedua, orientasi pada hubungan (relationship-oriented) menyoroti kualitas perhatian pemimpin terhadap hubungan interpersonal dengan berbagai pihak, termasuk atasan, rekan sejawat, dan bawahan. Ketiga, orientasi pada efektivitas (effectiveness-oriented) menekankan kemauan pemimpin untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, model ini menggambarkan variasi gaya kepemimpinan dari yang sangat efektif hingga kurang efektif, serta perbedaan dalam hubungan interpersonal yang bersifat formal atau erat. (Syari, Putra, 2015)

Yang kedua teori Opini Leadership. Istilah "opinion leader" dalam literatur komunikasi, terutama pada periode tahun 1950-1960-an. Sebelumnya, dalam literatur komunikasi, istilah seperti "influentials," "influencers," atau "tastemakers" sering digunakan untuk merujuk pada apa yang kemudian dikenal sebagai opinion leader. Perubahan istilah ini mencerminkan perkembangan dan pergeseran dalam pemahaman konsep tersebut.

Pada masa itu, istilah opinion leader lebih dikenal di masyarakat pedesaan. Hal ini dapat dihubungkan dengan kondisi pada waktu itu, di mana tingkat penetrasi media masih rendah dan tingkat pendidikan belum mencapai tingkat maju. Dalam konteks pedesaan, informasi lebih sering diterima dari individu yang dianggap memiliki pemahaman yang tinggi atau pengetahuan yang lebih mendalam. (Sariyono, 2017)

Keberadaan opinion leader di pedesaan menjadi semakin penting karena akses terbatas terhadap media serta kurangnya pendidikan menyebabkan kebutuhan akan informasi harus dipenuhi melalui sumber-sumber lokal yang dianggap memiliki pemahaman lebih baik. Oleh karena itu, pada saat itu, opinion leader di pedesaan menjadi pihak yang memainkan peran penting dalam menyampaikan dan membentuk pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau informasi.

Teori yang ketiga adalah teori tentang Komunikasi Politik. Mueller mendefinisikan komunikasi politik ialah hasil yang memiliki sifat politik, apabila ditekankan kepada hasil. Sedangkan apabila komunikasi politik didefinisikan dengan menekankan pada fungsi dalam sistem politik ialah komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik serta terjadi di antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Mueller (1973)

Dalam pandangan Mueller (1973), komunikasi politik dapat diartikan sebagai hasil yang bersifat politik apabila fokusnya diletakkan pada hasil komunikasi itu sendiri. Artinya, ketika sebuah pesan atau informasi dikomunikasikan dengan tujuan dan dampak yang bersifat politik, maka dapat dianggap sebagai komunikasi politik. Sementara itu, jika kita menekankan definisi komunikasi politik dari segi fungsinya dalam suatu sistem politik, Mueller menjelaskan bahwa komunikasi politik melibatkan interaksi dan pertukaran informasi di dalam suatu sistem politik, serta berlangsung dalam hubungan antara sistem politik tersebut dengan lingkungannya. Dengan demikian, Mueller memberikan perspektif yang holistik terhadap komunikasi politik, mengakui baik aspek hasil politik maupun peran fungsionalnya dalam konteks sistem politik yang lebih luas.

Komunikasi politik secara umum dapat dimaknai dalam kerangka politik sebagai upaya peran atau aktor dalam mencapai tujuan. Berpolitik pada dasarnya adalah berkomunikasi. Menurut Littlejohn di dalam komunikasi terdapat level atau tingkatan komunikasi yaitu komunikasi interpersonal (antarpribadi), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. (Amelianti 2021)

Melalui pendekatan ini, penelitian akan mencoba mengidentifikasi strategi komunikasi yang efektif yang diterapkan oleh Kepala Desa untuk membangun citra positif, mendapatkan dukungan masyarakat, dan akhirnya meraih kemenangan dalam konteks pemilihan kepala desa. Dengan menganalisis berbagai dimensi komunikasi politik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil pemilihan kepala desa di tingkat lokal

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan teori Kepemimpinan Situasional oleh kepala desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam memenangkan pemilihan ?
2. Bagaimana Penerapan Teori Opini Leadership dalam komunikasi politik bisa berdampak positif terhadap sikap politik masyarakat ?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi politik dalam pemilihan kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan teori Kepemimpinan Situasional oleh kepala desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dalam memenangkan pemilihan.
2. Untuk mengetahui dampak positif dari penerapan teori opini leadership terhadap sikap politik masyarakat Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi komunikasi politik dalam pemilihan kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Peningkatan Pemahaman Terhadap Politik Lokal

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik lokal di Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Dengan mempelajari strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Kepala Desa dalam memenangkan pemilihan, penelitian ini dapat mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kampanye politik di tingkat desa. Pemahaman ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan lokal, seperti warga desa, calon kepala desa, dan partai politik lokal.

2. Rujukan Riset Berikutnya

Penemuan serta metodologi riset ini bisa jadi rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang mau meningkatkan tema seragam ataupun mengeksplorasi aspek- aspek lain dari strategi komunikasi politik di tingkatan desa. Dengan demikian, riset ini bisa membuka jalur untuk uraian yang lebih holistik serta mendalam terhadap dinamika politik di tingkatan desa.

1.5. Hipotesis

1. Penerapan Sistem Kepemimpinan Situasional oleh kepala desa Curahkalong di Kecamatan Bangsalsari mempengaruhi strategi dan tindakan yang diambilnya dalam menghadapi kemenangan pemilihan.
2. Penerapan teori opini leadership dalam komunikasi politik berpengaruh positif terhadap sikap politik masyarakat di Desa Curahkalong Bangsalsari Kabupaten Jember.

3. Faktor Pendidikan, Ekonomi dan Usia mempengaruhi Strategi Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

1.6. Kerangka Pemikiran



Kepemimpinan Situasional adalah teori yang mengakui bahwa pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan di sekitarnya. Hal ini tercermin dalam praktik yang dilakukan oleh Kepala Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Melalui survei lapangan yang dilakukan oleh peneliti, terlihat adanya perubahan dalam sifat kepemimpinan dari setiap periode hingga saat ini prode ke dua untuk persiapan pemilihan prode ke tiga. Ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang dimiliki oleh kepala desa dalam menghadapi dinamika dan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Teori opini leadership merupakan sebuah konsep yang memperhatikan sifat-sifat kepemimpinan dan bagaimana opini atau pandangan terhadap seorang pemimpin dibentuk dalam masyarakat. Dalam konteks kepala desa Curahkalong, upaya untuk membangun opini leadership menjadi suatu hal yang krusial dalam proses pemilihan kepala desa. Kepala desa tersebut, dengan berbagai strategi dan tindakan, berusaha untuk membentuk citra dirinya sebagai seorang pemimpin yang dihormati dan diandalkan oleh masyarakat. Riset peneliti yang memilih topik ini didorong oleh adanya pola gerak politik yang terlihat jelas, di mana proses

pemilihan kepala desa sangat terkait dengan bagaimana opini dan persepsi terhadap kepemimpinan dibentuk dan disebarkan di antara warga masyarakat.

Teori komunikasi politik memainkan peran penting dalam pemahaman tentang dinamika politik, terutama di tingkat lokal seperti Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalasari, khususnya dalam konteks pemilihan kepala desa. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa setiap proses pemilihan demokratis untuk memilih pemimpin selalu mengaitkan dirinya dengan aspek politik, yang menjadi fokus utama dalam ilmu komunikasi politik. Di Desa Curahkalong, kepala desa berusaha membangun strategi komunikasi politik yang efektif, dengan memperhatikan aspek personalnya dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan konteks politik lokal.

Dalam konteks dinamika pemilihan kepala desa, teori sistem sosial menyoroti interaksi kompleks antara berbagai elemen yang terlibat dalam proses pemilihan. Sistem sosial di desa melibatkan beragam aktor seperti pemilih, kandidat, kelompok masyarakat, lembaga lokal, dan faktor eksternal seperti politik nasional dan dinamika sosial-ekonomi. Pemilihan kepala desa adalah hasil dari dinamika sosial yang kompleks, termasuk interaksi antara faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang saling terkait. Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi desa, serta faktor-faktor seperti identitas kelompok, kebijakan publik, dan pengaruh media, dapat memengaruhi hasil pemilihan kepala desa.

Mengintegrasikan teori ilmu pemerintahan dalam analisis dinamika masyarakat dalam pemilihan kepala desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalasari, Kabupaten Jember karena teori tersebut memberikan landasan yang kuat dalam memahami proses politik dan administrasi pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks pemilihan kepala desa, pemahaman tentang teori ilmu pemerintahan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kekuasaan dipertahankan, keputusan diambil, dan kebijakan diterapkan dalam konteks masyarakat lokal. Dengan demikian, integrasi teori ilmu pemerintahan dapat membantu saya dalam menganalisis secara komprehensif dinamika politik dan administrasi yang terjadi selama proses pemilihan kepala desa, serta implikasinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Teori pemilihan rasional, teori ini memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis perilaku individu dalam konteks pengambilan keputusan. Dalam konteks pemilihan kepala desa, teori ini memungkinkan saya untuk memahami bagaimana para pemilih melakukan

evaluasi rasional terhadap kandidat yang tersedia berdasarkan pada kepentingan dan preferensi mereka. Dengan menggunakan pendekatan ini, saya dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemilih dalam memilih kepala desa.

Dalam kerangka pikiran yang telah dibuat oleh peneliti, riset ini menggunakan tiga teori utama, yaitu kepemimpinan situasional, opini leadership, dan komunikasi politik. Dari teori kepemimpinan situasional dan opini leadership, muncul turunan berupa komunikasi politik, yang kemudian menjadi dasar untuk strategi komunikasi politik dalam memenangkan pemilihan kepala desa di Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Dari ketiga teori utama tersebut, timbul beberapa teori yang terkait dengan kepemimpinan situasional, opini leadership, dan komunikasi politik.

Selanjutnya, dalam konteks masyarakat, terjadi berbagai fenomena politik terkait dengan pemilihan kepala desa. Tiga teori yang saling terkait ini meliputi Teori Identitas Sosial, Pemilihan Rasional, dan pendekatan ilmu pemerintahan. Teori Identitas Sosial menekankan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka dalam kelompok sosial tertentu, dan bagaimana identitas ini memengaruhi perilaku politik mereka. Pemilihan Rasional fokus pada bagaimana individu membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian secara rasional. Sementara itu, pendekatan ilmu pemerintahan mencakup analisis struktur dan proses pemerintahan dalam konteks politik. Ketiga teori ini dipengaruhi oleh strategi komunikasi politik yang terinspirasi dari teori kepemimpinan situasional dan teori opini leadership. Teori kepemimpinan situasional menyatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin bergantung pada situasi tertentu yang dihadapi, sementara teori opini leadership menyoroti peran opini publik dalam membentuk persepsi terhadap pemimpin politik.

Diharapkan dengan kerangka pikiran yang disusun tersebut, penelitian dapat dilakukan dengan lebih sistematis, efisien, dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu mengembangkan "Strategi Komunikasi Politik Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Dalam Memenangkan Pemilihan Kepala Desa".